



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

PERUBAHAN RENJA (P-RENJA)

Nomor : 000.7.6.4/0602/300.05

2025

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAMARINDA**



**PERUBAHAN RENCANA
KERJA
(P-RENJA)**

TAHUN 2025



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA SAMARINDA TAHUN 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025, dan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2024 Nomor 53);
8. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (P-RENJA)

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 berpedoman pada Perubahan RKPD, dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
- (4) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Perubahan Renja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
- c. BAB III Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. BAB IV Penutup.

Pasal 4

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 terdiri dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah Kota Samarinda;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda;
 - e. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda;
 - f. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
 - g. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda;
 - h. Dinas Kesehatan Kota Samarinda;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda;
 - j. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda;
 - k. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda;
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
 - n. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda;
 - o. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda;
 - p. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda;
 - q. Dinas Perdagangan Kota Samarinda;
 - r. Dinas Perikanan Kota Samarinda;

- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
 - t. Dinas Perhubungan Kota Samarinda;
 - u. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda;
 - v. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda;
 - w. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda;
 - x. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda;
 - y. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda;
 - z. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda;
 - aa. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda;
 - ab. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
 - ac. Sekretariat Daerah Kota Samarinda;
 - ad. Sekretariat DPRD Kota Samarinda;
 - ae. Kecamatan Loa Janan Ilir;
 - af. Kecamatan Samarinda Seberang;
 - ag. Kecamatan Palaran;
 - ah. Kecamatan Sungai Kunjang;
 - ai. Kecamatan Samarinda Kota;
 - aj. Kecamatan Samarinda Ulu;
 - ak. Kecamatan Samarinda Ilir;
 - al. Kecamatan Samarinda Utara;
 - am. Kecamatan Sambutan; dan
 - an. Kecamatan Sungai Pinang.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah sesuai dengan:
- a. Sistematika dan Substansi Penulisan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 September 2025

WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN





PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Balaikota, Jl. Kesuma Bangsa No.82, Kelurahan Bugis, Kec. Samarinda Kota,
Kota Samarinda, Kode Pos 75242
Kalimantan Timur

Yth

1. Inspektur Daerah Kota Samarinda
2. Sekretaris DPRD Kota Samarinda
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
4. Camat Se-Kota Samarinda

SURAT EDARAN

Nomor: 000.7.2.4/0398/300.01

Tentang **Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah** **(Perubahan Renja-PD) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda** **Tahun 2025**

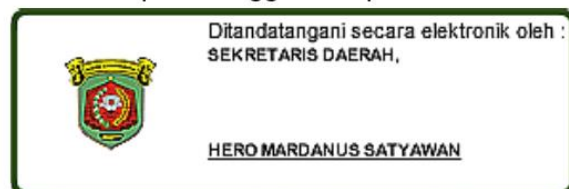
Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Tahun 2025, menyesuaikan dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta dukungan prioritas Provinsi dan Nasional;
2. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Tahun 2025 berkoordinasi dengan BAPPERIDA Kota Samarinda;
3. Perangkat Daerah menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Tahun 2025;
4. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Tahun 2025 sesuai dengan sistematika penyusunan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. (Lampiran 2)
5. Dokumen Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sesuai dengan jadwal yang tertera dalam Lampiran 3.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 April 2025



Unduh DOKUMEN ASLI di <https://ttev2.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 1368F-2025-16-60-010



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Lampiran 1

Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Samarinda
Nomor : 000.7.2.4/0398/300.01

1. Inspektorat Daerah Kota Samarinda
2. Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda
5. Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Samarinda
8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda
9. Dinas Kesehatan Kota Samarinda
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda
13. Dinas Perdagangan Kota Samarinda
14. Dinas Perikanan Kota Samarinda
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
16. Dinas Perhubungan Kota Samarinda
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda
18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda
20. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Samarinda
21. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda
22. Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda
23. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda
24. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Samarinda
25. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda
26. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kota Samarinda
27. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda
28. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda
29. Sekretariat Daerah Kota Samarinda
30. Sekretariat DPRD Kota Samarinda
31. Kecamatan Palaran
32. Kecamatan Samarinda Ilir
33. Kecamatan Samarinda Seberang
34. Kecamatan Samarinda Utara
35. Kecamatan Samarinda Ulu
36. Kecamatan Sungai Kunjang
37. Kecamatan Sambutan
38. Kecamatan Sungai Pinang
39. Kecamatan Samarinda Kota
40. Kecamatan Loa Janan Ilir



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Prmsasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Sumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Lampiran 2

Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Samarinda
Nomor : 000.7.2.4/0398/300.01

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

- BAB I Pendahuluan**
Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah
- BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan I Tahun Berkenaan**
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2025 sampai dengan Triwulan I tahun 2025
- BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**
Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan
- BAB IV Penutup**
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

Lampiran 3

Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Samarinda

Nomor : 000.7.2.4/0398/300.01

Jadwal Tentatif Pelaksanaan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Kota Samarinda Tahun 2025

No	Waktu	Kegiatan
1	16 April 2025	Surat Edaran Wali Kota Tentang Penyusunan Perubahan Renja-PD Tahun 2025
2	Minggu ke 3 April 2025	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja-PD Tahun 2025
3	23 April 2025	Rancangan Perubahan Renja-PD Tahun 2025 disampaikan pada Kepala BAPPERIDA
4	Minggu ke-4 April 2025	Rancangan Perubahan Renja-PD Tahun 2025 diverifikasi oleh BAPPERIDA
5	Minggu ke-5 April 2025	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD PD Tahun 2025
6	Minggu ke-2 Mei 2025	Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD Tahun 2025 disampaikan pada Kepala BAPPERIDA
7	Minggu ke-4 Mei 2024	Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD Tahun 2025 diverifikasi oleh BAPPERIDA
8	Minggu ke-3 Juni 2025	Penyampaian Rancangan Akhir Perubahan Renja-PD Tahun 2025 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah
9	Minggu ke-4 Juni 2025	Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-PD) Tahun 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan berkat dan rahmat-Nya telah tersusun Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025. Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) merupakan salah satu dokumen perencanaan jangka pendek yang merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Walikota melalui berbagai kegiatan tahunan yang akan digunakan dalam 1 (satu) periode anggaran.

Di dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 ini kami uraikan sesuai dengan Rencana Pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun anggaran 2025. Upaya koreksi atau masukan dari semua pihak sangat diperlukan untuk penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ini dan khususnya masukan bagi langkah-langkah penyusunan tahapan selanjutnya.

Akhir kata, disampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2025.

Samarinda, 11 September 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Samarinda,



MIFTAHURRIZQA, SE.
NIP. 197207101998031012



DAFTAR ISI

	Halaman
Bab I. PEDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan Renja	5
1.5. Kerangka Ekonomi Daerah	6
1.6. Sistematika Penulisan	6
 Bab II. Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Sampai dengan Triwulan II tahun 2025	8
 Bab III. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Rancangan Perubahan Renja tahun 2025	24
3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025-2029.....	25
3.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025	29
 Bab IV PENUTUP	39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026 yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Sesuai pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, perubahan Renja mengikuti perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) karena adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi :

- a. Prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat keputusan Kepala Daerah tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda disusun untuk menyesuaikan perubahan program dan kegiatan yang tertuang pada Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 11 Agustus Tahun 2025 di Lingkungan



Pemerintah Kota Samarinda. Dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Penyesuaian anggaran dan hasil evaluasi program serta kegiatan sampai dengan triwulan II berdampak pada capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.

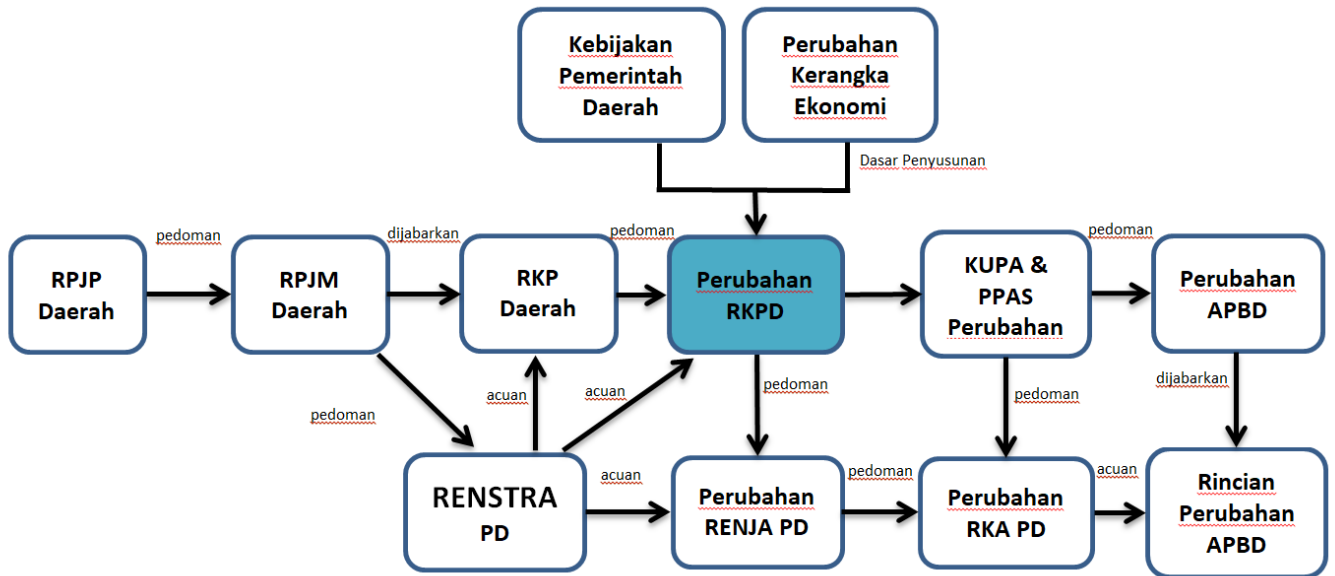
Tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun keterkaitan hubungan dokumen Perubahan RENJA dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Keterkaitan Antara Perubahan Renja dengan
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda di susun atas dasar undang-undang dan peraturan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang No. 10 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewaspadaan dini Masyarakat di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;



7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 36 Tahun 2010, Tentang Pedoman fasilitasi Pendidikan Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
11. Permendagri No 18 Th 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Kepmendagri 1317 2023 Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 nomenklatur program kegiatan per 23 Juni 2023;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda;
19. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 40 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 tanggal 22 Juli 2025;



20. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 47 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 11 Agustus Tahun 2025;
21. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 tanggal 11 September Tahun 2025;

1.3 Maksud dan tujuan Perubahan Renja

Adapun maksud Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 adalah memberikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan triwulan berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2025 yang menunjukkan adanya kesesuaian dengan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Tahun 2025;
- b. Rencana Strategis yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dan sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan I dan II perencanaan dan penganggaran tahunan PD;

1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja

Dasar Pertimbangan Perubahan Renja antara lain :

- a. Tingkat kerawanan-kerawanan baik dari segi ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya yang masih cukup tinggi sehingga dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat kota Samarinda khususnya dan dapat memecahbelah bangsa Indonesia umumnya (sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial) Program yang dimaksud antara lain Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dan Program



- Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
- b. Berbagai macam latar belakang masyarakat kota Samarinda baik dari suku, agama, ras dan Ormas yang berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan konflik di masyarakat (sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat) Program yang dimaksud antara lain Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
 - c. Adanya aksi-aksi terorisme, radikalisme dan komunisme yang dapat mengancam keutuhan masyarakat kota Samarinda khususnya dan bangsa Indonesia umumnya (sesuai Kepres Nomor 10 Tahun 1986 tentang FORKOPIMDA) Program yang dimaksud antara lain Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

1.5 Kerangka Ekonomi Daerah

Sebagaimana yang termuat dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010 diuraikan arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah dimana tujuan hakiki pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Arah kebijakan ekonomi daerah adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi kepala Daerah. Kegiatan pembangunan daerah hendaknya dilengkapi dengan pelayanan publik dan infrastruktur yang baik. Pembangunan infrastruktur saat ini untuk mendukung perekonomian seperti pertambangan, industri, perdagangan, jasa dan pariwisata.

Selain faktor diatas kondisi sosial politik yang stabil juga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi menanamkan modalnya di kota Samarinda.

1.6. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. : Pendahuluan

Memuat/menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan renja, kerangka ekonomi daerah serta sistematika penyusunan perubahan Renja berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;



BAB II. : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sampai dengan Triwulan II tahun 2025

BAB III. : Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Samarinda

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB IV : Penutup

Memuat catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja dan rencana tindak lanjutnya.



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Badan Badan Kesataun Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	95%	46,25%	46,25%

Sasaran Strategis Badan Badan Kesataun Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 yakni *Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial* dengan Indikator Kinerja Utama *Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial*. Hingga Triwulan II Tahun 2025, Realisasi capaian sebesar 46,25% dari target capaian 95% belum dapat menunjukkan capaian, kegiatan sepenuhnya baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

2.2 Evaluasi Kinerja Program

Badan Badan Kesataun Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam rangka pencapaian sasaran strategis Tahun 2025 melaksanakan lima program utama, yaitu:



1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kelima program tersebut memiliki target kinerja yang telah ditetapkan sebagai ukuran pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Program

No	Program	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi Sampai dengan TW II	Capaian
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	47,14%	47,14%
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100%	50%	50%
3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100%	46,18%	46,18%
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100%	43,75%	43,75%
5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	100%	50%	50%

Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan indikator Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target 100% untuk triwulan II tahun 2025 pencapaian 47,14% belum dapat tercapai 100% kegiatan sepenuhnya baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui



mendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan indikator Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik dengan target 100% untuk triwulan II tahun 2025 pencapaian 50% belum dapat tercapai 100% kegiatan sepenuhnya baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dengan indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif dengan target 100% untuk triwulan II tahun 2025 pencapaian 46,18% belum dapat tercapai 100% kegiatan sepenuhnya baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya dengan indikator Persentase Kebijakan di Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan dengan target 100% untuk triwulan II tahun 2025 pencapaian 43,75% belum dapat tercapai 100% kegiatan sepenuhnya baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan indikator Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan dengan target 100% untuk triwulan II tahun 2025 pencapaian 50% belum dapat tercapai 100% kegiatan sepenuhnya baru akan dilaksanakan pada Triwulan III dan IV.

2.3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi hasil Renja pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil peningkatan kualitas kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025 sampai dengan Triwulan II.

Analisis hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dilakukan dengan mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pencapaian realisasi kinerja program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda sampai dengan triwulan II tahun 2025 dengan ketersediaan anggaran sebesar



Rp. 19.967.926.227,- (*sembilan belas milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua puluh dua puluh dua puluh tujuh rupiah*) yang terdiri dari 6 (enam) Program Prioritas, 12 (dua belas) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 46,25% dan capaian realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp. 7.882.750.781,- (*tujuh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah*) atau persentase sebesar 39,75%.

Evaluasi kinerja pada Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana hasil yang diperoleh melalui aplikasi eDalev, dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda
Tahun Berjalan Triwulan II Tahun 2025

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai dengan RKPD Kota Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
			K	Rp.	K	Rp.	Sumber Dana	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1	2	3	4		5		6			7		8		9			
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda																	
8	1					108.838.915.173	100%	19.936.426.227			5.066.611.181		7.925.631.136		116.764.546.309	39,75	
8	1	2				3.268.611.600		2.421.161.000			206.883.065		278.042.838		3.546.654.438	47,14	
8	1	2								8,64			16,97				
8	1	2	2.01			3.268.611.600		2.421.161.000			206.883.065		278.042.838		3.546.654.438	50,00	
8	1	2	2.01					1200 orang	1200 Orang		250		550				
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.105.751.600		278.500.000	PAD		28.606.765		44.586.538		1.150.338.138	18,67	
8	1	2	2.01	4	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembaوران Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	825 orang		800 Orang		150			350				
8	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		112.180.000	95.286.000	PAD		-		-		112.180.000	50,00	
8	1	2	2.01	5	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembaوران Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6 laporan		8 Laporan		0			0				
8	1	2	2.01	7	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka		100.680.000		148.125.000	PAD		102.839.060		102.839.060		203.519.060	14,29

Kode				Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai dengan RKPD Kota Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
						K	Rp.	K	Rp.	Sumber Dana	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1				2	3	4		5		6			7		8		9	
8	1	2	2.01	7	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	7 Dokumen		4 Dokumen			2		2					
8	1	2	2.01	8	Pembentukan Paskibraka		1.850.000.000		96.250.000	PAD		8.431.500	8.431.500		1.858.431.500	50,00	8,76	
8	1	2	2.01	8	Jumlah Paskibraka	300 Orang		40 Orang			20		20					
8	1	2	2.01	11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.		100.000.000		1.803.000.000	PAD		67.005.740	122.185.740		222.185.740	0,00	6,78	
8	1	2	2.01	11	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila.	44 Orang		300 Orang			150		150					
8	1	3	2.01		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		78.518.572.387		5.277.910.000			2.496.011.493	3.672.938.693		82.191.511.080	50,00	69,59	
8	1	3	2.01		Persentase masyarakat peserta sosialisasi yang memahami pendidikan politik	100%		100%			30		55					
8	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah		78.518.572.387		5.277.910.000			2.496.011.493	3.672.938.693		82.191.511.080	50,00	69,59	
8	1	3	2.01		Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik Daerah	1000 orang		1200 Orang			300		600					
8	1	3	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		62.911.729.387		3.850.000.000	PAD		2.383.621.905	3.558.129.905		66.469.859.292	100	92,42	

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai dengan RKPD Kota Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
							K	Rp.	K	Rp.	Sumber Dana	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
							1		2		3		4		5		6			7	
8	1	3	2.01	2	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	10 dokumen		10 Dokumen			10		10								
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		14.064.843.000		944.679.000	PAD		87.879.588		90.298.788		14.155.141.788		19,82	9,56		
8	1	3	2.01	4	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5700 orang		2500 Orang			800		800								
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerja Sama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah		1.542.000.000		483.231.000	PAD		24.510.000		24.510.000		1.566.510.000		25	5,07		
8	1	3	2.01	5	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 laporan		12 Laporan			3		3								
8	1	4	2.01		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		468.600.000		263.728.000			48.186.640		51.426.640		520.026.640		46,18	19,50		
8	1	4	2.01		Persentase jumlah ormas yang di berdayakan	100,00%		100%			0,57		0,613								

Kode				Perangkat Daerah/Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai dengan RKPD Kota Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
						K	Rp.	K	Rp.	Sumber Dana	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1				2		3		4		5			6		7		8		9	
8	1	4	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksaaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		468.600.000		263.728.000			48.186.640		51.426.640		520.026.640	52,00	19,50			
8	1	4	2.01		Jumlah Ormas yang dibina	25 Ormas		45 Ormas		15		26								
8	1	4	2.01	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas , Pemberdayaan Ormas , Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		420.000.000		125.440.000	PAD		19.500.000		22.740.000		442.740.000	68,18	18,13			
8	1	4	2.01		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	440 orang		600 Orang		100		175								
8	1	4	2.01	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas , Pemberdayaan Ormas , Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		48.600.000		138.288.000	PAD		28.686.640		28.686.640		77.286.640	40,00	20,74			
8	1	4	2.01		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	25 laporan		50 Laporan		20		20								
8	1	5	2.01	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA		1.193.950.000		1.284.255.000			352.437.066		352.437.066		1.546.387.066	43,75	27,44			
8	1	5	2.01		Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial budaya dan ke Agamaan	100%		100%		0.15		0.26								
8	1	5	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya	40 laporan	1.193.950.000		1.284.255.000			352.437.066		352.437.066		1.546.387.066	45,00	27,44			
8	1	5	2.01		Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	40 laporan		45 Laporan		15		26								

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai dengan RKPD Kota Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
						K	Rp.	K	Rp.	Sumber Dana	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						1		2		3		4		5		6			7	
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi , Sosial Budaya, dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika , Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		173.950.000		139.002.000	PAD		1.767.370		1.767.370		175.717.370	37,21	1,27		
8	1	5	2.01	4		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1075 orang		600 Orang		115		115							
8	1	5	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika , Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1.020.000.000		1.145.253.000	PAD		350.669.696		350.669.696		1.370.669.696	40,00	30,62		
8	1	5	2.01	5		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	25 laporan		30 Laporan		10		10							
8	1	6	2.01		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		17.057.122.948		2.157.175.000			126.192.145		145.372.145		17.202.495.093	50,00	6,74		
8	1	6	2.01			Persentase deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	100%		100%		0.01		0.06							
8	1	6	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		17.057.122.948		2.157.175.000			126.192.145		145.372.145		17.202.495.093	50,00	6,74		
8	1	6	2.01			Jumlah Potensi Konflik Sosial yang di tangani	24 kasus		24 Kasus		8		14							
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		626.402.500		239.812.000	PAD		35.108.250		39.658.250		666.060.750	444,20	16,54		

Kode				Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai dengan RKPD Kota Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
						K	Rp.	K	Rp.	Sumber Dana	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1				2	3	4		5		6			7		8		9	
8	1	6	2.01	4	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	1000 orang		1500 Orang			0		375					
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		91.230.000		100.000.000	PAD			-			91.230.000	21,43	0,00
8	1	6	2.01	5	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini Kerjasama Intelijen Pemantauan Orang Asing Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	14 laporan		14 Laporan			0		0					
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota		16.339.490.448		1.817.363.000	PAD		91.083.895	105.713.895		16.445.204.343	50,00	5,82	
8	1	6	2.01	6	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 dokumen		12 Dokumen			3		6					
																46,25	69,67	
																SR	S	
						100.506.856.935		11.404.229.000								46,25	69,67	
																SR	S	
8	1	1	2.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		8.332.058.238		8.532.197.227			1.836.900.772	3.425.413.754		11.757.471.992	0,00	40,15	
8	1	1	2.01		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 nilai		88 nilai			0		22					
8	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		200.000.000		243.730.000			10.981.790	42.990.290		242.990.290	0,00	17,64	
8	1	1	2.01		Nilai AKIP	80,40		80,5 nilai			0		20					
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100.000.000		150.000.000	PAD		-	32.008.500		132.008.500	40,00	21,34	

Kode				Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai dengan RKPD Kota Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
						K	Rp.	K	Rp.	Sumber Dana	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
1				2		3		4		5			6		7		8		9	
8	1	1	2.01	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen			0		1							
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		50.000.000		43.730.000	PAD		2.205.000		2.205.000		52.205.000	100	5,04		
8	1	1	2.01	6	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan			0		0							
8	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50.000.000		50.000.000	PAD		8.776.790		8.776.790		58.776.790	100,00	17,55		
8	1	1	2.01	7	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan			0		0							
8	1	2	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.745.870.768		7.032.929.931			1.672.654.558		3.181.570.251		9.927.441.019	50,00	45,24		
8	1	2	2.02		Jumlah Laporan	7 Laporan		7 Laporan			2		3							
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		5.632.227.768		5.811.417.715	PAD		1.424.350.713		2.636.416.406		8.268.644.174	100,00	45,37		
8	1	1	2.02	1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan		65 Orang/bulan			0		65							
8	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1.063.643.000		1.174.696.216	PAD		232.761.050		529.611.050		1.593.254.050	50,00	45,08		
8	1	1	2.02	2	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen		40 Dokumen			10		20							
8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		50.000.000		46.816.000	PAD		15.542.795		15.542.795		65.542.795	20,00	33,20		
8	1	1	2.02	5	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan		5 Laporan			1		1							
8	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		-		160.000.000			-		-						
8	1	1	2.05		Jumlah Pegawai	0		105 Orang			0		0							
8	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-		60.000.000	PAD		-		-						

Kode				Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai dengan RKPD Kota Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
						K	Rp.	K	Rp.	Sumber Dana	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1				2	3	4		5		6			7		8		9	
8	1	1	2.05	2	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0		100 Paket			0		0					
8	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-		100.000.000	PAD		-		-				
8	1	1	2.05	9	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0		20 Orang			0		0					
8	1	2	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		478.670.840		293.500.000			74.407.953		92.517.614		571.188.454	50,00	31,52
8	1	2	2.06		Jumlah Laporan	12 Laporan		12 Laporan			3		6					
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		5.999.100		10.000.000	PAD		-		-			0,00	0
8	1	1	2.06	1	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket		12 Paket			0		0					
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		197.640.000		50.000.000	PAD		4.570.000		4.570.000		202.210.000	33,33	9,14
8	1	1	2.06	2	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket		12 Paket			0		0					
8	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		-		10.000.000	PAD		5.883.000		5.883.000				
8	1	1	2.06	3	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0		5 Paket			1		1					
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		24.651.000		17.500.000	PAD		12.410.000		12.410.000		37.061.000	40,00	70,91
8	1	1	2.06	4	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	5 Paket		5 Paket			1		1					
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		42.999.740		35.000.000	PAD		15.885.567		15.885.567		58.885.307	50,00	45,39
8	1	1	2.06	5	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket		12 Paket			3		3					
8	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		-		3.000.000	PAD		-		-				
8	1	1	2.06	6	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0		4 Dokumen			0		0					

Kode				Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai dengan RKPD Kota Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)			
						K	Rp.	K	Rp.	Sumber Dana	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1				2		3		4		5			6		7		8		9	
8	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		12.000.000		12.000.000	PAD		2.160.000		2.160.000		14.160.000	50,00	18,00		
8	1	1	2.06	8	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan			1		1							
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		195.381.000		187.500.000	PAD		33.499.386		51.609.047		1.541.267.991	30,00	27,52		
8	1	1	2.06	9	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		30 Laporan			10		17							
8	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		73.124.000			-		-						
8	1	1	2.07		Laporan Rencana Kebutuhan Barang	0		2 Laporan			0		0							
8	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		-		63.124.000	PAD		-		-						
8	1	1	2.07	1	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0		2 Unit			0		0							
8	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel		-		10.000.000	PAD		-		-						
8	1	1	2.07	5	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0		12 Unit			0		0							
8	1	2	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		45.226.648		238.411.046			3.809.031		4.188.159		49.414.807	50,00	1,76		
8	1	2	2.08		Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan		12 Laporan			3		6							
8	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		20.000.000		25.000.000	PAD		0		0			0,00	0,00		
8	1	1	2.08	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan		12 laporan			0		0							
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		7.056.648		18.913.296	PAD		809.031		1.188.159		1.541.267.991	50,00	6,28		
8	1	1	2.08	2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan		36 Laporan			9		18							
	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-		22.647.750	PAD		-		-						

Kode	Perangkat Daerah/Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Sampai dengan RKPD Kota Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2025)		Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	
			K	Rp.	K	Rp.	Sumber Dana	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4		5		6			7		8		9	
1.08.3		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0		12 Laporan			0		0					
8.1.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			18.170.000		171.850.000	PAD		3.000.000		3.000.000		1.541.267.991	30,00	1,75
8.1.1.2.08.4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	10 laporan		10 laporan			3		3					
8.1.2.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			98.200.750		490.502.250			75.047.440		104.147.440		202.348.190	50,00	21,23
8.1.2.2.09		Laporan Pemeliharaan	12 Laporan		12 Laporan			3		6					
8.1.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			44.706.750		250.502.250	PAD		66.870.000		95.970.000		1.541.267.991	44,44	38,31
8.1.1.2.09.1		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit			5		9					
8.1.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.000.000		10.000.000	PAD		8.177.440		8.177.440		1.541.267.991	33,33	81,77
8.1.1.2.09.6		Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	12 Unit		12 Unit			3		3					
8.1.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			28.494.000		230.000.000	PAD		-		-		1.541.267.991	100	0,00
8.1.1.2.09.9		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit			0		0					
													34,26	56,07	
													SR	R	
													51,22	66,87	
													R	S	
			7.567.969.006		8.299.073.227										
													53,3	70,73	
													R	S	



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda tahun 2025 disusun dalam rangka pencapaian target indikator kinerja dan sasaran strategis tahun 2025. Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja ini dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran serta hal-hal dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tujuan dan sasaran strategis tersebut. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan atau merencanakan program dan kegiatan tahun 2025 disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya program dan kegiatan yang menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda.
2. Pencapaian Visi Pemerintah Kota Samarinda yaitu **SAMARINDA MAJU untuk KALTIM MAJU** sedang misi Pemerintah Kota Samarinda yaitu
 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing.
 2. Mewujudkan ekonomi Samarinda yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.
 3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
 4. Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis.
 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan inovatif, responsif, dan adaptif yang berintegritas dan akuntabel.

Dalam mendukung Visi dan Misi Kota Samarinda yang telah disebutkan diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Ssmarinda Kota Samarinda terfokus pada khusus misi 4 (empat) yaitu *Mewujudkan Samarinda layak huni melalui stabilitas kamtibmas, ketahanan sosial budaya dan ekologis*



3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Tujuan akan menentukan bagian-bagian tujuan yang lebih pendek atau sasaran yang akan diwujudkan sebagai indikator dapat tidaknya suatu tujuan terwujud. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Sasaran dan indikator sasaran berdasarkan tujuan yang ingin dicapai untuk kurun waktu 2025-2029 dalam Tabel 3.1 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH MATRIK RENSTRA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA TAHUN 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Penghitungan	Satuan	Kondisi Awal		Taget dan Pagu Indikatif Tahun						Kelompok Sasaran	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Terwujudnya Kota Samarinda yang aman dan tangguh berlandaskan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatkan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan kepada Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Indikator Tujuan : Indeks Penyelenggaraan Trantibum Linmas Indikator Sasaran : Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang memahami Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Pendidikan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama disertai dengan Meningkatkan Penanganan Konflik Sosial $= \frac{P1 + P2 + P3 + P4 + P5}{5} \times 100$ <p>P1 = Persentase Program 1 P2 = Persentase Program 2 P3 = Persentase Program 3 P4 = Persentase Program 4 P5 = Persentase Program 5</p> <p>P1 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dibagi target peserta x 100% P2 = Realisasi jumlah Masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Politik dibagi target peserta x 100% P3 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di lingkungan Ormas dibagi target peserta x 100% P4 = Realisasi jumlah Masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada pelaku ekonomi, sosial, budaya dan agama dibagi target peserta di kali 100% P5 = Realisasi jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dalam penyelesaian konflik dibagi target jumlah masyarakat. yang berpotensi terlibat konflik di kali 100%</p>	%	0	0	66%	66,65%	71%	75%	78%	80%	Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, Ormas dan LSM	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda	Kota Samarinda Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa



3.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas (utama) merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan/Sub Kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja, kebutuhan dan sumber dana/pagu indikatif, catatan penting. Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 disusun berdasar hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Murni, yang mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 triwulan II dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap RKPD Tahun 2025.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan harus mengacu kepada tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029, untuk program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2025.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Subkeg. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - Subkeg. Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
 - Subkeg. Pembentukan Paskibraka
 - Subkeg. Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik



- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Subkeg. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - Subkeg. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
 - ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - Subkeg. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- 4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**
 - ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya



- Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Subkeg. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
 - Subkeg. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Subkeg. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - Subkeg. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (FORKOPIMDA)

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- ✓ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Subkeg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 - Subkeg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Subkeg. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ✓ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



- Subkeg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Subkeg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Subkeg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD
- ✓ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Subkeg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Subkeg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Subkeg. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- ✓ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Subkeg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Subkeg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Subkeg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Subkeg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Subkeg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Subkeg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Subkeg. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Subkeg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Subkeg. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Subkeg. Pengadaan Mebel
 - Subkeg. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Subkeg. Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - Subkeg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Subkeg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Subkeg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Subkeg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ✓ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- Subkeg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Subkeg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Subkeg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pada Rancangan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Tahun 2025 terdapat 6 (enam) Program Prioritas, 12 (dua belas) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan, dengan Pagu Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 19.501.574.675,- menjadi anggaran perubahan sebesar Rp. 23.324.547.841-.

Rincian Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda Anggaran Perubahan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 tertuang dalam tabel sebagai berikut :

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA									19.501.574.675,00	19.967.926.227,00	21.590.741.530,00	2.089.166.855,00					29.137.988.363,00			
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							19.501.574.675,00	19.967.926.227,00	21.590.741.530,00	2.089.166.855,00					29.137.988.363,00			
8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							19.501.574.675,00	19.967.926.227,00	21.590.741.530,00	2.089.166.855,00					29.137.988.363,00			
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah				88 %	76.80 Nilai Nilai	9.791.574.675,00	8.563.697.227,00	7.940.447.000,00	4.369.090.029,00					14.160.664.704,00			
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai SOP				80,5 NILAI	100 %	250.000.000,00	243.730.000,00	120.192.500,00	-129.807.500,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN	90.040.704,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	49.508.500,00	-100.491.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		33.765.264,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	43.730.000,00	30.053.500,00	-19.946.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		33.765.264,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	40.630.500,00	-9.369.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		22.510.176,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun dan dilaporkan secara tepat waktu				7 Laporan	100 %	8.110.950.675,00	7.032.929.931,00	6.651.228.672,00	-1.459.722.003,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN	11.450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	6.991.340.247,00	5.811.417.715,00	5.621.398.956,00	-1.369.941.291,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		10.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40 Dokumen	40 Dokumen	1.069.610.428,00	1.174.696.216,00	984.696.216,00	-84.914.212,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima		1.400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	46.816.000,00	45.133.500,00	-4.866.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Perangkat Daerah yang mendapat pelayanan Kepegawaian				105 Orang	100 %	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN		250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			190.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				1 Laporan	100 %	437.500.000,00	325.000.000,00	225.590.850,00	-211.909.150,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN		537.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	5 Paket	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			17.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	12 Paket	35.000.000,00	35.000.000,00	32.340.850,00	-2.659.150,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				4 Laporan	4 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				30 Laporan	30 Laporan	250.000.000,00	187.500.000,00	93.750.000,00	-156.250.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Tingkat pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang</i>				2 Laporan	100 %	73.124.000,00	73.124.000,00	73.124.000,00	0,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN		73.124.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				2 Unit	2 Unit	63.124.000,00	63.124.000,00	63.124.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			63.124.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase jasa penunjang yang terpenuhi sesuai SOP</i>				12 Laporan	100 %	600.000.000,00	238.411.046,00	219.808.728,00	-380.191.272,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN		1.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	17.160.978,00	-7.839.022,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				36 Laporan	36 Laporan	50.000.000,00	18.913.296,00	12.000.000,00	-38.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	22.647.750,00	22.647.750,00	-477.352.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				10 Laporan	10 Laporan	25.000.000,00	171.850.000,00	168.000.000,00	143.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik</i>				12 Laporan	100 %	160.000.000,00	490.502.250,00	490.502.250,00	330.502.250,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	ASN dan Non ASN		160.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>				18 Unit	18 Unit	70.000.000,00	250.502.250,00	250.502.250,00	180.502.250,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUB JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				1 Unit	1 Unit	80.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	150.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
2.	8.01.02	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				33.33 %	100 %	2.150.000.000,00	2.421.161.000,00	2.280.509.000,00	1.446.250.000,00							3.596.250.000,00		
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>				1200 Orang	1200 Orang	2.150.000.000,00	2.421.161.000,00	2.280.509.000,00	130.509.000,00			Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, Ormas dan LSM		3.596.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				800 Orang	800 Orang	300.000.000,00	278.500.000,00	278.500.000,00	-21.500.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			700.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																			
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				8 Laporan	8 Laporan	100.000.000,00	95.286.000,00	1.340.000,00	-98.660.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																			
			<i>Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	148.125.000,00	123.169.000,00	-26.831.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																			
			<i>Jumlah Paskibraka</i>				300 Orang	300 Orang	1.500.000.000,00	1.803.000.000,00	1.801.300.000,00	301.300.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8.01.02.2.01.0011	Penggangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																			
			<i>Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila</i>				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	96.250.000,00	76.200.000,00	-23.800.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			96.250.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik				100 %	100 %	3.750.000.000,00	5.277.910.000,00	4.727.329.905,00	3.374.594.695,00							7.124.594.695,00		
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Jumlah peserta sosialisasi Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>				1200 Orang	1200 Orang	3.750.000.000,00	5.277.910.000,00	4.727.329.905,00	977.329.905,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat, Ormas dan LSM		7.124.594.695,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>				10 Dokumen	10 Dokumen	2.250.000.000,00	3.850.000.000,00	3.687.319.905,00	1.437.319.905,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			3.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2500 Orang	2500 Orang	1.000.000.000,00	944.679.000,00	821.606.000,00	-178.394.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.574.594.695,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	483.231.000,00	218.404.000,00	-281.596.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			1.550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang Aktif				17,07 %	100 %	280.000.000,00	263.728.000,00	220.130.375,00	220.000.000,00							500.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jumlah Ormas yang dibina				45 Ormas	45 Ormas	280.000.000,00	263.728.000,00	220.130.375,00	-59.869.625,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Ormas LSM, OKP, Paguyuban dan Yayasan		500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				600 Orang	600 Orang	130.000.000,00	125.440.000,00	118.671.500,00	-11.328.500,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Laporan	50 Laporan	150.000.000,00	138.288.000,00	101.458.875,00	-48.541.125,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan				45 %	100 %	1.180.000.000,00	1.284.255.000,00	1.139.995.250,00	-273.521.036,00							906.478.964,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				45 Laporan	45 Laporan	1.180.000.000,00	1.284.255.000,00	1.139.995.250,00	-40.004.750,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat		906.478.964,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				600 Orang	600 Orang	150.000.000,00	139.002.000,00	100.453.250,00	-49.546.750,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			453.239.482,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				30 Laporan	30 Laporan	1.030.000.000,00	1.145.253.000,00	1.039.542.000,00	9.542.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			453.239.482,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan				20 %	100 %	2.350.000.000,00	2.157.175.000,00	5.282.330.000,00	500.000.000,00							2.850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah potensi konflik sosial yang di tangani				24 Kasus	24 Kasus	2.350.000.000,00	2.157.175.000,00	5.282.330.000,00	2.932.330.000,00			Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima	Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa, Ormas dan LSM		2.850.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1500 Orang	1500 Orang	250.000.000,00	239.812.000,00	3.863.480.000,00	3.613.480.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				14 Laporan	14 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	83.950.000,00	-16.050.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000.000,00	1.817.363.000,00	1.334.900.000,00	-665.100.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	5. Penguatan Pelayanan yang Prima 5. Penguatan Pelayanan yang Prima			2.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAMARINDA
J U M L A H									19.501.574.675,00	19.967.926.227,00	21.590.741.530,00	2.089.166.855,00							29.137.988.363,00	



BAB IV

P E N U T U P

Catatan penting :

- a. Dalam penyelenggaraan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda untuk mencapai tujuan dan sasaran maka sangat diperlukan sekali adanya program dan kegiatan yang dapat menunjang proses perencanaan Pemerintahan yang strategis, serta dapat di pertanggungjawabkannya dalam realisasi pelaksanaannya.
- b. Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen yang memuat program dan kegiatan prioritas dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dimana dalam pelaksanaannya harus efisien, transparan, akuntabel dan partisipasi.
- c. BAPPEDA selaku perencana anggaran diharapkan dapat menambahkan anggaran dalam usulan Perubahan Renja ini antara lain :
 - 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**
 - ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
 - 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**
 - ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
 - ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.



4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

- ✓ Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Samarinda berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan program ataupun kegiatan yang dapat mendukung pembangunan kota Samarinda.

Samarinda, 11 September 2025

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Samarinda,


MIFTAHURRIZQA, SE.
NIP. 197207101998031012